

## Partisipasi Politik Masyarakat Purwakarta Pada Pilkada 2024 dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pemilu

Syifa Maulia Salma<sup>1</sup>, Jaliludin Muslim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: [syifamauliasalma@gmail.com](mailto:syifamauliasalma@gmail.com)

### Abstract

*The Regional Head Election (Pilkada) serves as one of the main pillars of democracy in Indonesia, providing a mechanism for citizens to choose their leaders and determine the direction of development policies. Political participation plays a crucial role in shaping the quality of Pilkada, particularly in fostering political legitimacy, transparency, and accountability. This study focuses on analyzing the level of political participation in Purwakarta Regency during the 2024 Pilkada, aiming to identify influencing factors and offer practical recommendations to enhance future participation. This research employs a descriptive qualitative method, utilizing data sourced from official KPU documentation and interviews with key informants. The findings reveal a participation rate of 74%, with significant variations across districts. Factors influencing participation include education level, access to information, trust in candidates, and geographical barriers. Additionally, political apathy and money politics remain challenges that need to be addressed. The study recommends several strategic actions, such as increasing the intensity of electoral socialization, strengthening political education, and providing special services for groups with limited access to polling stations. It also highlights the importance of improving candidate quality to build public trust. Future research is suggested to focus on apathetic groups, the effectiveness of socialization strategies, and the engagement of first-time voters to strengthen the foundation of local democracy. Thus, it is hoped that political participation in Purwakarta Regency can be further maximized, ensuring a more representative and high-quality Pilkada.*

**Keywords:** *Political participation, Pilkada, local democracy, Purwakarta, election quality*

### Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan pembangunan. Partisipasi politik masyarakat memegang peran penting dalam menentukan kualitas Pilkada, terutama dalam menciptakan legitimasi politik, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada analisis tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Purwakarta dalam Pilkada 2024, dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya serta memberikan

rekomendasi praktis untuk meningkatkan partisipasi di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang diambil dari dokumentasi resmi KPU dan wawancara dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mencapai 74%, dengan variasi di setiap kecamatan. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mencakup tingkat pendidikan, akses informasi, kepercayaan terhadap kandidat, dan hambatan geografis. Selain itu, apatisisme politik dan praktik politik uang masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan intensitas sosialisasi pemilu, memperkuat pendidikan politik, dan menyediakan layanan khusus bagi kelompok yang sulit mengakses TPS. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya perbaikan kualitas kandidat untuk menarik kepercayaan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk fokus pada kelompok apatis, efektivitas strategi sosialisasi, dan keterlibatan pemilih pemula untuk memperkuat fondasi demokrasi lokal. Dengan demikian, diharapkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Purwakarta dapat lebih maksimal, mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan representatif.

**Kata Kunci:** Partisipasi politik, Pilkada, demokrasi lokal, Purwakarta, kualitas pemilu.

## Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia. Pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan sejauh mana demokrasi lokal berfungsi secara efektif. Keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik. Dalam hal ini, Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji, mengingat dinamika politik lokalnya yang terus berkembang. Partisipasi politik masyarakat di Purwakarta memainkan peran sentral dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan, seperti diskusi politik, kampanye, hingga pengawasan terhadap jalannya proses pemilu. Tingginya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi pemilu, meminimalkan potensi konflik, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar representatif.

Menurut Ramlan pada artikel pikiran rakyat, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati di Purwakarta mencapai 79,4% melewati target yang telah ditentukan. Dengan total suara yang masuk dari 17 Kecamatan di wilayah Purwakarta sebanyak 518.646 suara. Sementara jika dirinci terdapat 497.256 suara sah, dan suara tidak sah sebanyak 21.390. Meskipun angka ini menunjukkan keterlibatan yang cukup baik, masih terdapat tantangan, yang dapat memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Misalnya, tingkat pendidikan, akses informasi, kualitas kandidat memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik warga. Selain itu, strategi sosialisasi pemilu oleh penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu elemen penting yang dapat memengaruhi keterlibatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sering kali memiliki akses informasi terbatas serta pengaruh praktik politik uang di beberapa wilayah. Di sisi lain,

tingkat golput di Purwakarta juga menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang merasa apatis atau tidak percaya pada sistem politik yang ada.

Secara teoretis, partisipasi politik merupakan salah satu elemen kunci dalam teori demokrasi deliberatif (Habermas, 1996), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan legitimasi politik yang kuat. Partisipasi yang inklusif dan berkualitas tidak hanya meningkatkan legitimasi hasil Pilkada, tetapi juga membantu mencegah polarisasi dan konflik yang dapat merusak tatanan demokrasi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten Purwakarta selama pelaksanaan Pilkada 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan tiga pertanyaan penelitian:

- RQ1. Bagaimana persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta?
- RQ2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh dalam pemilu pilkada?
- RQ3. Bagaimana pemerintah mengantisipasi untuk mencapai target partisipasi masyarakat di Kabupaten Purwakarta?

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan pilkada yang meneliti permasalahan yang berkaitan dengan fenomena dan dinamika politik pemula pada Pilkada Jabar 2018 di Kabupaten Purwakarta bahwasannya pada saat itu pemilih dari kalangan remaja Purwakarta berusia 17-20 tahun dan tipe pemilih rasional (Rohendi & Muzzammil, 2021). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan. Pertama, penelitian ini memiliki fokus pada partisipasi masyarakat. Kedua, menjadi bahan pemerintah dalam membuat strategi politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam menganalisis pengaruh partisipasi politik di Kabupaten Purwakarta.

Partisipasi politik didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, termasuk memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, keterlibatan dalam kampanye, hingga pengawasan terhadap jalannya pemilu (Verba, Scholzman, & Brady, 1995). Tingginya partisipasi politik masyarakat mencerminkan legitimasi politik dan kestabilan demokrasi. Menurut teori demokrasi deliberatif (Habermas, 1996), partisipasi politik adalah elemen fundamental dalam proses pengambilan keputusan yang inklusif, dimana masyarakat diberikan ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik seringkali dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, sosial, dan kepercayaan terhadap sistem politik (Liddle, 1996).

Dalam upaya memperdalam praktik demokrasi, Fung dan Wright (2003) memperkenalkan konsep *Empowered Participatory Governance (EPG)* melalui buku mereka, *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Model ini menawarkan pendekatan inovatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola lokal dengan menekankan deliberasi, desentralisasi kekuasaan, dan akuntabilitas. Konsep EPG berangkat dari gagasan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi aktor utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan melalui: (a) **Penyelesaian Masalah Secara Kolektif**, dimana masyarakat dilibatkan untuk merancang solusi atas isu-isu lokal, seperti pengelolaan anggaran daerah, kebijakan pendidikan, dan layanan publik. Sebagai contoh, program anggaran partisipatif di Porto Alegre, Brasil, menjadi model

keberhasilan yang sering dirujuk dalam buku ini; (b) **Deliberasi yang Inklusif**, dimana proses deliberasi memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan pendapat mereka. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mayoritas masyarakat; (c) **Desentralisasi Kekuasaan**, dimana kekuasaan diserahkan kepada komunitas lokal untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desain tata kelola seperti ini memungkinkan terciptanya solusi yang lebih responsif; dan (e) **Akuntabilitas Institusi**, dimana keputusan yang dibuat dalam kerangka EPG bersifat terbuka untuk pengawasan publik, sehingga menciptakan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kualitas pemilu mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan legitimasi hasil pemilu (Diamond & Morlino, 2005). Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi salah satu indikator pemilu yang berkualitas. Dalam penelitian sebelumnya, Rohendi & Muzzammil (2021) mengidentifikasi bahwa pada Pilkada Jabar 2018 di Kabupaten Purwakarta, tingkat partisipasi pemilih kalangan muda sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan politik dan pendekatan kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pemilu sangat erat kaitannya dengan sejauh mana masyarakat memahami pentingnya hak suara mereka.

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, di antaranya: (a) **Tingkat Pendidikan**: Pendidikan memberikan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya peran politik dalam kehidupan masyarakat (Brady, Verba, & Scholzman, 1995). Di Indonesia, pendidikan politik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi, terutama di wilayah pedesaan; (b) **Kepercayaan pada Kandidat**: Penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kredibilitas kandidat memengaruhi motivasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Kandidat yang dianggap tidak kompeten atau tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat dapat menyebabkan apatisme politik; dan (c) **Sosialisasi Pemilu**: Strategi komunikasi dan edukasi yang efektif dari penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki akses informasi terbatas.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan kualitas Pilkada. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang tingkat partisipasi politik, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta hubungannya dengan kualitas Pilkada. Penggunaan metode ini memungkinkan penelitian untuk menggali dinamika dan realita pemilih, terutama di kalangan remaja, dalam Pilkada 2024 di Purwakarta.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan Teori Partisipasi Politik yang dikembangkan oleh Verba, Scholzman, & Brady (1995), yang menyatakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: sumber daya individu, akses informasi, dan lingkungan sosial. Menurut teori ini, partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi atau pendidikan, tetapi juga oleh jaringan sosial dan kesempatan yang dimiliki oleh individu untuk terlibat dalam kegiatan politik.

### Hasil dan Pembahasan

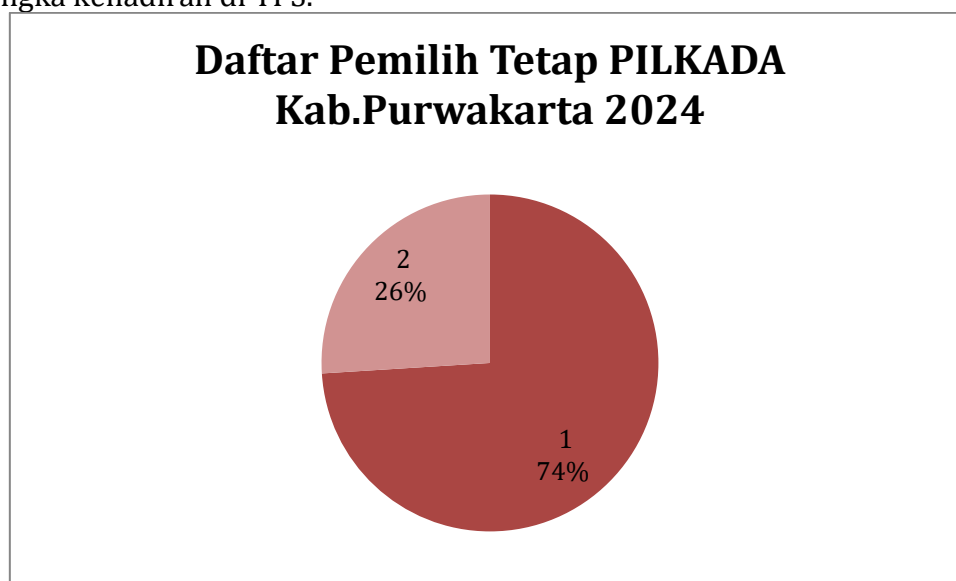
Partisipasi dalam pemilu sangat penting karena merupakan fondasi utama demokrasi. Pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan bagaimana arah kebijakan publik akan dijalankan. Tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwasannya Setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah berhak untuk memilih dalam Pemilu. Partisipasi politik masyarakat merupakan elemen penting yang mendukung integritas pemilu, karena keterlibatan yang luas dapat meningkatkan transparansi, legitimasi, dan akuntabilitas proses pemilu.

Partisipasi politik yang maksimal bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk menentukan masa depan bersama. Dengan berpartisipasi, masyarakat turut memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas. Sebuah proses politik yang melibatkan banyak pihak menciptakan pemerintahan yang lebih kuat, dipercaya, dan mampu menghadirkan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat.

Berikut Data yang diambil dari website resmi KPU terkait partisipasi masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam menggunakan hak pilihnya:

No	Kecamatan	TPS	Daftar Pemilih Tetap	Hak Suara	Tidak Pakai Hak Pilih
1	Purwakarta	267	131.657	93.822	37.835
2	Babakancikao	86	44.017	32.460	11.557
3	Bojong	80	39.275	30.108	9.167
4	Bungursari	84	43.933	33.954	9.979
5	Campaka	75	37.442	29.599	7.843
6	Cibatu	47	24.388	18.659	5.729
7	Darangdan	103	53.164	39.412	13.752
8	Jatiluhur	109	53.922	40.870	13.052
9	Kiarapedes	44	21.967	16.941	5.026
10	Maniis	53	26.461	18.265	8.196
11	Pasawahan	74	36.484	27.988	8.496
12	Plered	113	60.960	42.984	17.976
13	Pondoksalam	51	23.425	18.029	5.396
14	Sukasari	26	12.841	9.597	3.244
15	Sukatani	104	56.764	40.390	16.374
16	Tegalwaru	75	39.669	28.513	11.156
17	Wanayasa	71	32.599	25.307	7.292
<b>Jumlah</b>		<b>1462</b>	<b>738.968</b>	<b>546.898</b>	<b>192.070</b>

Dapat diartikan bahwasannya data diatas diambil dari dokumentasi KPPS yang mengunggah laporan suara ke website resmi KPU. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Purwakarta menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan 74% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari 738.968 pemilih yang terdaftar, sebanyak 546.899 orang hadir di TPS untuk memberikan suara. Partisipasi masyarakat bervariasi di setiap kecamatan. Beberapa kecamatan menunjukkan angka partisipasi yang tinggi, seperti Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh keberhasilan sosialisasi Pilkada di wilayah tersebut atau tingginya kesadaran politik masyarakat. Sebaliknya, kecamatan seperti Babakancikao dan Bojong mencatat tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran politik, atau bahkan hambatan geografis dapat menjadi penyebab rendahnya angka kehadiran di TPS.



**Gambar 1. Data Pemilih Tetap Pilkada 2024 (Data diolah peneliti)**

Gambar diatas diinterpretasikan dari Gambar 1 yang dimana daftar pemilih tetap PILKADA 2024 Kabupaten Purwakarta itu 738.968 orang. Dari diagram tersebut diartikan 74% merupakan partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang 26% tersebut merupakan masyarakat yang tidak datang ke TPS sebanyak 192.070 pemilih. Berdasarkan hasil data yang diambil dari website resmi KPU, tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam Pilkada terakhir mencapai 74%, mendekati rata-rata nasional.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam Pilkada 2024. Berdasarkan teori partisipasi politik yang dikembangkan oleh Verba, Scholzman, dan Brady (1995), terdapat tiga faktor utama yang berperan dalam partisipasi politik: tingkat pendidikan, akses informasi, dan modal sosial. Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan 3 informan, serta data sekunder dari KPU, digunakan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan tingkat partisipasi politik di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara Pemungutan Suara dan analisis data dari KPU, ditemukan bahwa masih banyak orang yang apatis dan ikut-ikutan terkait politik. Untuk itu pendidikan memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Purwakarta. Sebagian besar pemilih dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama mereka yang memiliki pendidikan SMA dan perguruan tinggi, lebih aktif dalam Pilkada. Hal ini sejalan dengan teori Verba et al. (1995), yang menyatakan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih baik, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya.

Wawancara dengan informan R juga mengungkapkan bahwa pemilih yang lebih berpendidikan cenderung lebih kritis terhadap proses politik dan calon pemimpin, yang membuat mereka lebih tertarik untuk ikut serta dalam pemilu. Sebaliknya, pemilih dengan pendidikan yang lebih rendah sering kali kurang memahami pentingnya Pilkada dan kurang memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang informasional dalam memilih kandidat.

Faktor lain yang memengaruhi partisipasi politik adalah akses terhadap informasi. Pemilih yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi politik, baik melalui media massa, internet, maupun informasi yang disediakan oleh penyelenggara pemilu, lebih cenderung berpartisipasi dalam Pilkada. Berdasarkan data dari KPU, daerah-daerah dengan akses informasi yang lebih mudah, seperti daerah perkotaan di Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Pemilih di wilayah ini cenderung mengikuti perkembangan politik melalui media sosial, televisi, dan radio, yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami kandidat dan isu-isu politik yang relevan.

Namun, di daerah pedesaan dengan akses informasi terbatas, tingkat partisipasi cenderung lebih rendah. Informan A menyebutkan bahwa banyak warga khususnya remaja yang tidak mendapatkan informasi yang cukup dan tidak tertarik tentang calon kandidat atau pentingnya Pilkada, sehingga mereka kurang terlibat dalam proses politik tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa akses informasi sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Verba et al. (1995), di mana pemilih yang memiliki informasi yang lebih banyak cenderung lebih aktif berpartisipasi.

Teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000) dan yang juga diintegrasikan dalam teori partisipasi politik Verba et al. (1995) menyatakan bahwa jaringan sosial dan keterlibatan dalam organisasi sosial sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pemilih yang terlibat dalam komunitas sosial atau organisasi lokal lebih aktif dalam Pilkada. Keluarga dan teman sering kali memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi, di mana diskusi politik dalam keluarga dan pertemuan komunitas meningkatkan kesadaran politik dan mendorong anggota untuk memilih.

Di sisi lain, pemilih yang lebih terisolasi atau tidak terlibat dalam jaringan sosial cenderung kurang aktif dalam proses pemilu. Hal ini terlihat pada beberapa kelompok muda yang tidak terlibat dalam organisasi atau kegiatan komunitas. Mereka kurang mendapat dorongan sosial untuk memilih dan lebih mudah terpengaruh oleh ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau kandidat yang ada. Untuk itu peran keluarga, teman organisasi dan komunitas berperan dalam membantu masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berkualitas di Kabupaten Purwakarta. Tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 74% pada Pilkada 2024 mencerminkan keterlibatan masyarakat yang cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Variasi partisipasi di berbagai kecamatan menunjukkan adanya pengaruh dari faktor-faktor lokal seperti keberhasilan sosialisasi, tingkat pendidikan, akses informasi, dan kesadaran politik masyarakat.

Dari data yang diperoleh, sebanyak 192.070 pemilih atau 26% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi peningkatan partisipasi, khususnya melalui upaya lebih lanjut untuk mengurangi apatisme politik, meningkatkan kepercayaan terhadap kandidat, dan memperluas akses informasi di daerah yang sulit dijangkau.

Partisipasi masyarakat tidak hanya penting dalam memberikan legitimasi politik kepada pemimpin yang terpilih, tetapi juga berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam proses demokrasi. Keberhasilan Pilkada di Kabupaten Purwakarta, sebagaimana yang telah dicapai, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan berbagai pihak terkait untuk merancang strategi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. Dengan demikian, demokrasi lokal dapat berjalan lebih inklusif dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar representatif.

## Rekomendasi Praktis

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti KPU, perlu meningkatkan sosialisasi Pilkada dengan pendekatan yang lebih inklusif. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui media sosial, media lokal, serta kegiatan tatap muka di komunitas pedesaan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sulit diakses. Meningkatkan literasi politik melalui program pendidikan di sekolah, pelatihan komunitas, dan diskusi publik. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Membuat solusi untuk para perantau jika PILKADA calon bupati dan wakilnya bisa dipilih walaupun sedang merantau.

## Penelitian Selanjutnya

Mengukur efektivitas metode sosialisasi pemilu yang telah dilakukan di Kabupaten Purwakarta untuk mengetahui pendekatan mana yang paling berhasil dan bagaimana strategi ini dapat ditingkatkan. Penelitian yang berfokus pada pola partisipasi pemilih pemula (usia 17-25 tahun), termasuk motivasi, tantangan, dan strategi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu mendatang. Serta selain itu Melakukan penelitian mengenai peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, termasuk pengaruhnya dalam menyebarkan informasi tentang Pilkada dan kampanye kandidat.

## Referensi

Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). *Beyond SES: A resource model of political participation*. *The American Political Science Review*, 89(2), 271-294.





- Diamond, L., & Morlino, L. (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Johns Hopkins University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- KPU Kabupaten Purwakarta. (2024). *Data Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Purwakarta*. Diakses dari situs resmi KPU.
- Liddle, R. W. (1996). *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Allen & Unwin.
- Rohendi, A., & Muzzammil, M. (2021). Dinamika Pemilih Pemula dalam Pilkada Jabar 2018: Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politik Lokal*, 5(2), 123–140.
- Fung, A., & Wright, E. O. (Eds.). (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso.
- Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Silverman, D. (2011). *Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.